ANALISIS KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM (KRP) DALAM KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS (KLS) PENGELOLAAN KAWASAN BOPUNCUR

Oleh : Nugraha, Drs. SE. M.Si.¹⁾

Kajian Lingkungan Strategik (Strategic Environmental Assessment) merupakan suatu proses yang sistematis dan komprehensif dalam evaluasi dampak lingkungan yang diperkirakan dapat timbul akibat pelaksanaan kebijakan, rencana, atau program (KRP) yang dilakukan pada tahap awal dari suatu proses pengambilan keputusan kegiatan pembangunan, selain pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan sosial. Salah satu komponen dalam studi KLS ini adalah studi terhadap KRP yang sudah ada. Dan tulisan ini menguraikan hasil studi KRP dari kawasan Bopuncur berikut sejumlah rekomendasi kebijakan yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan kawasan Bopuncur.

II. PENDAHULUAN

Kawasan Bogor – Puncak – Cianjur atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bopuncur merupakan salah satu kawasan di Propinsi Jawa Barat yang mengalami perkembangan wilayah yang sangat pesat. Perkembangan yang terjadi tidak terlepas dari posisi geografisnya yang strategis, yaitu terletak di antara poros yang menghubungkan ibukota negara (Jakarta) dan ibukota propinsi (Bandung). Bagi Jakarta dan sekitarnya, kawasan Bopuncur mempunyai peran yang sangat penting karena kawasan ini terletak di bagian hulu, yaitu berperan dalam pengendalian air permukaan dan air tanah bagi daerah hilir (termasuk wilayah DKI Jakarta). Disamping itu, kawasan Bopuncur merupakan kawasan penyangga bagi perkembangan pembangunan DKI Jakarta dan karakteristik alam yang dimiliki kawasan ini merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya.

Hal yang paling mendasar berkaitan dengan dinamika perkembangan di kawasan Bopuncur yang cenderung kurang terkendali adalah adanya kenyataan bahwa implementasi berbagai kebijakan yang ditujukan untuk kegiatan pemanfaatan dan perlindungan ekosistem di kawasan tersebut belum sepenuhnya harmonis. Bahkan dalam beberapa kasus, tumpang tindih peruntukkan masih terjadi.

Selama ini Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu perangkat pengelolaan lingkungan yang sudah banyak dimanfaatkan untuk menilai dampak suatu proyek. Namun demikian, perangkat tersebut tidak tepat untuk mengkaji pengelolaan lingkungan yang permasalahannya terkait erat dengan proses pengambilan keputusan atau kebijakan pengelolaan lingkungan seperti yang terjadi di kawasan Bopuncur. Seharusnya kajian dilakukan pada

1) Penulis adalah sebagai tenaga ahli bidang kebijakan publik dalam Studi KLS Bopuncur, kerjasama BPLHD Propinsi Jawa Barat dengan PPSDAL Universitas Padjadjaran, tahun 2003

level *strategic component* (tingkat hulu) dalam suatu *decision making cycle process*, yaitu kajian pada tingkat kebijakan, rencana atau program (KRP). Sementara AMDAL diaplikasikan pada tingkat hilir, yaitu pada tingkat proyek. Oleh karena itu, perangkat pengelolaan lingkungan yang lebih tepat untuk mengkaji permasalahan lingkungan di kawasan Bopuncur adalah Kajian Lingkungan Strategik (KLS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA). KLS merupakan suatu proses yang sistematis dan komprehensif dalam evaluasi dampak lingkungan yang diperkirakan dapat timbul akibat pelaksanaan kebijakan, rencana, atau program (KRP) yang dilakukan pada tahap awal dari suatu proses pengambilan keputusan kegiatan pembangunan, selain pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan sosial. Instrumen ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dan memberikan alternatif sistem pengelolaan lingkungan yang bersifat adaptif sebagai dasar dalam penetapan kebijakan pengelolaan lingkungan masa depan.

2. Identifikasi Kebijakan, Rencana atau Program (KRP) Kawasan Bopuncur

Kajian Lingkungan Strategik (KLS) merupakan kajian yang tentang dampak potensial akibat dari implementasi kebijakan, rencana, atau program (KRP) yang dalam konteks ini adalah pemanfaatan ruang di Kawasan Bopuncur. Untuk mendukung kajian tersebut, maka pada bagian ini akan dilakukan analisis terhadap sejumlah KRP yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten/kota yang secara administratif merupakan bagian dari Kawasan Bopuncur.

2.1 Kebijakan, Rencana atau Program (KRP) Nasional

Kebijakan, rencana dan program (KRP) nasional dalam rangka pengendalian kawasan Bopuncur diatur dalam Kepres No. 114/1999. Keppres No. 114 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Bopuncur diterbitkan dengan melandaskan pada UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, PP No. 47 tahun 1997 tentang RTRW Nasional serta Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Adapun pertimbangan dari diterbitkannya kebijakan ini adalah:

- Kurang berfungsinya Kawasan Bopuncur sebagai kawasan konservasi air dan tanah sebagai akibat dari perkembangan pembangunan yang sangat pesat dan kurang terkendali
- Kawasan Bopuncur sesuai dengan PP No. 47 tahun 1997 tentang RTRW Nasional termasuk kawasan tertentu yang memerlukan penangan khusus dan merupakan kawasan yang mempunyai nilai strategis - sebagai kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya termasuk DKI Jakarta
- Bahwa sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan, khususnya Kepres No. 79/1985 tentang penetapan RUTR Kawasan Puncak dan Kepres 48 tahun 1983 tentang penangan khusus penataan ruang dan penertiban wilayah jalur jalan Jakarta - Bogor - Puncak - Cianjur, dianggap sudah tidak memberikan jaminan lagi bagi konservasi tanah dan air.

2) lihat bagian menimbang dari Keputusan Presiden No. 114/1999

Dalam pasal 2 Kepres ini telah menegaskan Kawasan Bopuncur sebagai kawasan konservasi air dan tanah, dengan melingkupi 19 (sembilan belas) kecamatan yang tersebar di 4 (empat) Kabupaten. Melalui Kepres ini pemerintah mengharapkan Kawasan Bopuncur mampu menjalankan fungsinya utamanya sebagai kawasan konservasi air dan tanah yang menjamin tersedianya air dan tanah, air permukaan dan penanggulangan banjir bagi kawasan Bopuncur dan daerah

hilirnya. Secara lebih khusus tujuan tersebut diuraikan dalam beberapa sasaran, yaitu terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna serta tercapainya optimalisasi fungsi budidaya. Sejalan dengan tujuan dan sasaran tersebut, maka Keppres tersebut telah menetapkan pokok-pokok kebijakan penataan ruang Bopuncur, yang meliputi: (1) Perencanaan tata ruang; (2) Pemanfaatan tata ruang; (3) Pengendalian Pemanfaatan tata ruang.

Tabel 1
Kebijakan Penataan Ruang Bopuncur Sesuai dengan Kepres No. 114/1999

No.	Aspek	Kebijakan, Rencana, Program (KRP)
1.	Perencanaan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan lokasi dominasi pemanfaatan ruang dengan peta RTRK Bopuncur dengan skala 1:50.000 sebagai bagian dari Keppres ini. • Dengan masing-masing kawasan telah dijelaskan peruntukan dan manfaatnya yang bisa dihasilkan. • Adapun kawasan-kawasan tersebut: <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Lindung: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan hutang lindung • Kawasan Cagar Alam • Kawasan taman nasional • Kawasan taman wisata • Kawasan perlindungan setempat, yang terdiri: sempadan sungai, sekitar mata air, sekitar waduk/situ/danau b. Kawasan budidaya: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pertanian lahan basah • Kawasan lainnya, yang terdiri, pertanian lahan kering, kawasan perkebunan, dan pemukiman.
2.	Pemanfaatan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Telah diuraikan sejumlah larangan tentang sejumlah aktivitas (yang dibuat dalam kriteria) untuk masing-masing kawasan, termasuk larangan untuk memindah alih fungsikan satu lahan dengan lahan lain. • Untuk mengoperasionalkannya maka keputusan lain baik dari intansi vertikal dan daerah garis mengacu kepada Kepres ini. Yang dilakukan dengan koordinasi dan memperhatikan persyaratan teknis yang mendukung konservasi air dan tanah (Pasal 17)
3.	Pengendalian Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan, penelitian, pelaporan dan evaluasi oleh pemerintah daerah • Kegiatan pengendalian dilakukan dengan mekanisme: <ul style="list-style-type: none"> o Lurah (1 bulanan) kepada camat o Camat (1 bulanan) kepada bupati/walikota o Bupati/walikota (3 bulanan) o Gubernur (6 bulanan) kepada menteri

		<ul style="list-style-type: none"> • Adapun isi dari laporan tersebut adalah menyangkut: <ul style="list-style-type: none"> ○ Perkembangan Pembangunan fisik ○ Perkembangan perubahan hak atas tanah ○ Perubahan fungsi lahan ○ Masalah yang segera perlu diatasi ○ Masalah-masalah yang peluang muncul • Menteri bersama gubernur juga bupati/walikota mengadakan evaluasi hasil pemantauan, penelitian dan pelaporan tersebut berdasarkan kebutuhan. • Penertiban dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang dan menteri • Pembinaan: Pelaksanaan kegiatan pembinaan dikoordinasikan oleh gubernur • Lain-lain: <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi penataan ruang Bopuncur oleh menteri ○ RTRW 1:10.000 oleh Perda Propinsi ○ RTRW 1:5.000 oleh Perda Kabupaten/Kota
--	--	---

Sumber: Kepres No. 114/1999

Selanjutnya, dalam kepentingan identifikasi KRP di tingkat nasional, maka selain peraturan tersebut di atas, juga harus mempertimbangkan perjalanan semangat otonomi daerah yang saat ini telah berjalan. Untuk kepentingan tersebut ada dua peraturan perundangan yang juga harus dianalisis, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 1999.

Pertama, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selain dijadikan tonggak dari pengelompokan identifikasi juga tidak secara langsung memiliki keterhubungan dengan kajian lingkungan strategik Kawasan Bopuncur namun karena keberadaan undang-undang ini merupakan salah satu tonggak terpenting dalam perubahan sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam pemberian otonomi yang luas bagi daerah, sehingga diprediksikan akan memiliki keterkaitan dengan dampak potensial yang akan timbul dari pengelolaan Kawasan Bopuncur di masa yang akan datang.

Dalam pasal 10 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa: "*kewenangan daerah*

mencakup seluruh kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lain".

Secara khusus pasal yang bisa dipakai untuk menjelaskan kewenangan daerah dalam pengelolaan Bopuncur sebagai satu kawasan yang harus dikelola dengan mempertimbangan keberlangsungan lingkungannya (*sustainability emurment*) dapat dilihat dalam pasal 10. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung-jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan.

Dengan dua pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa menganalisis KRP yang melingkupi Kawasan Bopuncur harus dimulai secara simultan antara dari kebijakan yang datangnya dari pemerintah pusat, maupun kebijakan yang dibuat oleh daerah.

Kedua, PP No. 25 Tahun 1999 tentang Rincian Kewenangan Pusat dan Propinsi ini merupakan peraturan yang menjelaskan secara rinci yang menjadi kewenangan pusat

dan propinsi. Dan dalam kepentingan kajian ini, pasal-pasal yang memiliki relevansi di antaranya adalah:

- Pasal 3 poin 12 tentang Tata Ruang. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa: (1) penataan tata ruang propinsi berdasarkan kepada kesepakatan antara propinsi dan kabupaten/kota; (2) Propinsi memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tata ruang.
- Pasal 3 poin 16 tentang Lingkungan Hidup. Dalam pasal tersebut propinsi memiliki kewenangan dalam: (1) pengendalian lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; (2) pengaturan dalam pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas kabupaten/kota; (3) Penilaian AMDAL bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya lebih dari satu kabupaten/kota; (4) Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas kabupaten/kota; (5) penerapan baku mutu lingkungan.

2.1.2. Kebijakan, Rencana atau Program (KRP) Propinsi Jawa Barat

Dalam rangka operasionalisasi sejumlah kebijakan di tingkat nasional, Propinsi Jawa Barat telah menetapkan pembentukan TAT pengendalian tata ruang Kawasan Bopuncur melalui SK NO. 821/SK.05-BINPROD/1985 oleh Gubernur Jawa Barat. TAT sebagaimana dimaksud menjalankan fungsi untuk mengkoordinasikan rekomendasi teknis untuk penertiban perijinan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait maupun pengendalian pembangunan di Kawasan Bopuncur. Walaupun pada tahun 1993, Gubernur telah mencabut pembentukan TAT ini melalui SK. No. 24/1993. Pencabutan ini dilatarbelakangi

oleh adanya regulasi yang memberikan kewenangan kepada kabupaten (Tingkat II) baik dalam hal penertiban perijinan maupun pengawasan dan pengendalian. Sedangkan Propinsi Jawa Barat hanya menjalankan fungsi Koordinasi tata ruang propinsi.

Pada tahun 1986, Gubernur melalui Surat No. 593/Inst.561-Binprod/1986 menerbitkan instruksi yang mengatur tentang pengendalian mutasi tanah di Kawasan Bopuncur khususnya ditujukan kepada instansi yang berwenang melaksanakan kebijakan pertanahan. Dan pada tahun 1991, secara lebih spesifik melalui SK No. 413.21/SK-222-Huk/1991, Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan kriteria lokasi dan standar teknis penataan ruang di Kawasan Bopuncur.

Pada tahun 1994, sejalan dengan kondisi lingkungan di Kawasan Bopuncur yang semakin mengkhawatirkan maka Gubernur telah menerbitkan Surat No. 640/3246-Bappeda/1994, yang isinya melarang bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) di masing-masing Kabupaten untuk menerbitkan ijin lokasi di Kecamatan Sukaresmi, Cisarua, Pacet dan Cugenang Kabupaten Cianjur, serta Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung di Kabupaten Bogor sampai dilakukan kajian dan evaluasi daya dukung lingkungan.

Berdasarkan hasil evaluasi daya dukung lingkungan oleh Propinsi Jawa Barat yang bekerja sama dengan LPM-ITB yang tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Barat No. 640/182.Bappeda/1995 yang intinya menegaskan pelarangan penerbitan ijin lokasi pada seluruh desa-desa yang tercantum dalam Surat No. 640/3246-Bappeda/1994, kecuali 4 (empat) desa di Kecamatan Cisarua, 2 (dua) kecamatan di Megamendung serta

sebagian desa di Kecamatan Cugenang dan Sukaesmi.

Mengingat adanya perkembangan pembangunan yang kurang terkendali sehingga menyebabkan munculnya masalah tata ruang dan lingkungan di Kawasan Bopuncur, maka Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas mengeluarkan surat No. 2002 /MK-4/1996 tentang penanganan pembangunan di Kawasan Bopuncur yang pada dasarnya menekankan perlunya evaluasi tata ruang Kawasan Bopuncur. Melalui BKTRN telah dibentuk tim antar departemen (pokja Bopuncur) yang bertugas melakukan penilaian dan evaluasi tata ruang Kawasan Bopuncur yang baru. Sejalan dengan hasil evaluasi tersebut, maka Gubernur telah mengeluarkan surat No. 556.31/423/Bappeda/1998 tentang penataan ruang di Kawasan Bopuncur.

Pada tahun 2001, Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Jawa Barat untuk tahun 2001-2005. Dalam konteks KRP Kawasan Bopuncur, nampaknya tidak ada satu KRP yang secara khusus mengatur hal tersebut. Namun secara umum dalam pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan renstra ini telah merencanakan sejumlah program, di antaranya adalah:

- Pengembangan informasi SDA atau LH
- Penyusunan strategi pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan
- Penyusunan pedoman perlindungan dan pemanfaatan keragaman hayati
- Pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan

Pada tahun 2003 Jawa Barat juga telah mengeluarkan Perda No 2/2003 tentang RTRW Propinsi Jabar. Pasal 6 Perda ini menjelaskan bahwa cakupan RTRWP ini mencakup:

- Kebijakan perencanaan, yang meliputi rencana struktur tata ruang dan rencana pola ruang
- Kebijakan pemanfaatan ruang, yang meliputi program, kegiatan, tahapan dan pembiayaan pembangunan
- Kebijakan pengendalian pemanfaatan, meliputi kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang

Secara lebih spesifik pokok-pokok KRP dari Perda ini adalah sebagai berikut:

- RTRW Propinsi ini telah menetapkan sejumlah kawasan. Dan Kawasan Bopuncur telah ditetapkan sebagai kawasan andalan agrobisnis dan pariwisata (Pasal 27 ayat 3 poin b).
- Namun juga dalam pasal lain secara tersirat bahwa Kawasan Bopuncur ini juga termasuk kawasan lindung dan kawasan resapan air³.
- Untuk masing-masing kawasan, peta detailnya dibuat dengan skala 1:250.000 (pasal 30)
- Adanya penetapan untuk luas Kawasan Lindung di Jawa Barat ditetapkan 45% dari luas seluruh wilayah Jawa Barat, yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung di dalam hutan maupun di luar kawasan hutan (pasal 31 ayat a)
- Mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan air (pasal 31 ayat b)

3) Untuk sebagian besar, penyebutan nama daerah atau wilayah yang termasuk sebuah kawasan disebutkan secara tidak jelas, yaitu dengan hanya menyebut nama kabupaten atau kotanya saja. Sehingga peruntukkan kawasan Bopuncurpun menjadi kurang jelas.

- Mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung
- Pada pasal 34-41 kawasan lindung yang berfungsi lindung, disebutkan tidak secara spesifik (hanya menyebut nama kabupaten/kota)
- Telah ditetapkan rencana pola tata ruang untuk Jawa Barat, namun pola tersebut masih berbentuk kebijakan umum.

Selain yang bersifat kebijakan, dalam Perda ini telah terangkum sejumlah kebijakan yang bersifat rencana atau program, yaitu:

- Rencana pencapaian luas kawasan lindung yang 45% tersebut di atas akan dicapai secara bertahap, di mana angka 21% akan dicapai dalam tahun ketiga perencanaan ini dan angka 45% akan dicapai pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2010, yang akan dilakukan melalui:
 - Pengukuhan kawasan lindung
 - Rehabilitasi dan konservasi lahan kawasan lindung
 - Pengendalian kawasan lindung
 - Pengembangan partisipasi masyarakat
 - Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
 - Pengembangan pola intensif dan disintensif pengelolaan kawasan lindung
- Rencana untuk melakukan penataan kawasan andalan Bopuncur akan mulai dimulai dalam 5 tahun terakhir (2005-2010)
- Ada rencana prioritas untuk rehabilitasi konservasi DAS (pasal 71)
- Ada sejumlah program untuk mempertahankan kawasan budi

daya. Khususnya lahan sawah (pasal 73-75)

- Adanya rencana/program untuk pengendalian kualitas lingkungan, yang akan dilakukan melalui sejumlah kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan penegakan hukum dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam serta pengembangan daya dukung lingkungan buatan (pasal 78)
- Kegiatan-kegiatan dalam pasal 78 di atas, ditetapkan akan dilaksanakan secara bertahap melalui prioritas pembangunan

Pokok-pokok KRP lainnya dari Perda ini adalah:

- Memberikan kewenangan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang kepada Gubernur melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- Tim koordinasi pengendalian memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan dan pemberian ijin pemanfaatan ruang (pasal 83)
- mekanisme pengawasan melalui proses berjenjang dari kabupaten/kota
- Munculnya ketentuan pidana bagi setiap yang melanggar ketentuan Perda ini.

Kebijakan, Rencana atau Program (KRP) Tingkat Kabupaten/Kota

1. Kebijakan, Rencana atau Program (KRP) Kabupaten Cianjur

Identifikasi KRP tentang Kawasan Bopuncur untuk Kabupaten Cianjur dapat ditelusuri dari tiga perda, yaitu:

- Perda Nomor 5 tahun 1994 tentang Review Detail ~~Tata~~ Ruang (RDTR) Kawasan Puncak
- Perda Nomor 1 tahun 1997 tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur
- Perda No. 8 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur tahun 2001 – 2005

Perda No. 5 tahun 1994 tentang RDTR Kawasan Puncak telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan petunjuk pengendalian pembangunan dalam rangka memulihkan dan mencegah kerusakan lingkungan di kawasan tersebut (pasal 2).

Dan dari hasil identifikasi atas perda tersebut, KRP yang muncul sebagian besar dalam bentuk kebijakan. Di mana pasal-pasal yang ada hanya bersifat penetapan kriteria serta lokasi bagi kawasan tersebut yang termasuk kawasan lindung, kawasan budidaya pertanian dan budidaya non pertanian. Tapi disayangkan penetapan kriteria ini masih sangat umum dan dengan lokasi yang hanya menyebut nama daerah kecamatan dan desanya saja⁴. Di bagian lain perda ini menetapkan pula bahwa yang melanggar Perda ini dapat dikenakan hukuman pidana.

2. Kebijakan, Rencana atau Program (KRP) Kabupaten Bogor

Dalam Perda No. 1 tahun 1997 Kabupaten Cianjur telah menetapkan sejumlah kebijakan yang berhubungan penataan tata ruang Kabupaten Cianjur secara keseluruhan, dan yang secara langsung berhubungan dengan Kawasan Bopuncur di antaranya adalah:

- Penetapan Kota Cipanas sebagai pusat pelayanan pariwisata, permukiman, perdagangan dan jasa, agro industri, kegiatan koleksi dan distribusi (pasal 9).
- Bopuncur juga ditetapkan sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu kawasan hutan dan kawasan resapan air (pasal 16)
- Ada sebagian wilayah Kawasan Bopuncur yang termasuk kawasan sempadan sungai, sesuai dengan kriteria yang dipakai pasal 17 perda ini yaitu 100 m dari pinggir sungai.
- Ada sebagian wilayah Kawasan Bopuncur yang dikategorikan juga sebagai kawasan taman nasional
- Ada sebagian wilayah Kawasan Bopuncur yang dikategorikan juga sebagai kawasan lahan pertanian basah dan tanaman pangan
- Selain itu dalam pasal 28 Puncak sebagai bagian dari Kawasan Bopuncur ditetapkan pula sebagai kawasan pengembangan prioritas

Sedangkan dalam Perda No. 8 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah, hasil identifikasi tidak menemukan secara khusus program dan kebijakan yang langsung terkait dengan Kawasan Bopuncur ini. Namun dalam salah satu tujuan dan sarannya ada yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup yang direncanakan akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

3. Kebijakan Lainnya Yang berkaitan dengan Penanganan Bopuncur

Identifikasi KRP tentang Kawasan Bopuncur untuk Kabupaten Bogor dapat ditelusuri dari

4) Untuk sebagian besar, penyebutan nama daerah atau wilayah yang termasuk sebuah kawasan disebutkan secara tidak jelas, yaitu dengan hanya menyebut nama kabupaten atau kotanya saja. Sehingga peruntukkan kawasan Bopuncurpun menjadi kurang jelas.

empat peraturan perundangan yang telah dikeluarkan, yaitu:

- Perda Nomor 3 tahun 1988 tentang Review Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Puncak
- Perda Nomor 17 tahun 2000 tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor
- Perda No. 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Bogor tahun 2002 – 2006
- Renstra Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor tahun 2002-2006

Perda No. 3 tahun 1988 tentang RDTR Kawasan Puncak telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan petunjuk pengendalian pembangunan dalam rangka memelihara, meningkatkan dan mencegah kerusakan lingkungan hidup (pasal 2).

Dan dari hasil identifikasi atas perda tersebut, KRP yang muncul sebagian besar dalam bentuk kebijakan. Di mana pasal-pasal yang ada hanya bersifat penetapan kriteria serta lokasi bagi kawasan tersebut yang termasuk kawasan lindung, kawasan jalur pengamanan aliran sungai dan mata air, kawasan penyangga dan kawasan budidaya pertanian dan non pertanian. Tapi disayangkan penetapan kriteria ini masih sangat umum dan dengan lokasi yang hanya menyebut nama daerah kecamatan dan desa saja⁵.

Dalam Perda No. 11 tahun 2000 Kabupaten Bogor telah menetapkan sejumlah kebijakan yang berhubungan penataan tata ruang Kabupaten Bogor secara keseluruhan, dan yang secara langsung berhubungan dengan Kawasan Bopuncur di antaranya adalah:

- a. Bopuncur juga ditetapkan sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu kawasan hutan dan kawasan resapan air (pasal 39)
- a. Ada sebagian wilayah Kawasan Bopuncur yang termasuk kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai), sesuai dengan kriteria yang dipakai pasal 40 perda ini yaitu 50 - 100 m dari pinggir sungai.
- b. Ada sebagian wilayah Kawasan Bopuncur yang dikategorikan juga sebagai kawasan suaka alam dan pelestarian alam (pasal 41-42)
- c. Ada sebagian wilayah Kawasan Bopuncur yang dikategorikan juga sebagai kawasan rawan bencana, kawasan perdesaan, kawasan pertanian (pasal 45)
- d. Dalam pasal 47 Puncak sebagai bagian dari Kawasan Bopuncur ditetapkan pula sebagai kawasan pengembangan prioritas pariwisata dan kawasan konservasi tanah dan air
- e. Selain itu, dalam pasal 56-57 ditentukan pula kegiatan pengawasan dan penertiban pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan tersebut.

Selanjutnya dalam Propeda Kabupaten Bogor, diidentifikasi bahwa tidak ada KRP yang secara langsung berhubungan dengan Kawasan Bopuncur, namun secara umum dalam bidang LH dan SDA Kabupaten Bogor memiliki program di antaranya: menginventarisir potensi, membangun dan mengembangkan SIM SDA dan LH, mengendalikan kerusakan terhadap tanah, air, flora dan fauna serta meningkatkan upaya pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan SDA dan LH.

5) Walaupun Perda ini mengharuskan pembuatan batas wilayah perencanaan setiap kawasan dalam peta dengan skala 1:10.000 dan 1:30.000

Hal yang sama terdapat dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan LH. Artinya tidak ada KRP yang secara khusus untuk Kawasan Bopuncur.

2. Kebijakan, Rencana atau Program (KRP) Kota Depok

Identifikasi KRP tentang kawasan Bopuncur untuk Kota Depok dapat ditelusuri dari satu peraturan daerah, yaitu: Perda Nomor 12 tahun 2001 tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok. Dalam Perda tersebut Kota Depok telah menentukan peruntukan tata ruang di wilayahnya dalam bentuk kawasan-kawasan. Kawasan Bopuncur termasuk:

- kawasan pengembangan baik itu untuk permukiman dengan kepadatan rendah, agribisnis, pertanian dan jasa pariwisata (pasal 7)
- kawasan pengendalian, khususnya kawasan lahan basah, yang dijaga agar tidak terjadi alih fungsi lahan (pasal 8)
- Kawasan preservasi (pasal 9)
- Dan dalam pasal-pasal lain dijelaskan pula sejumlah kriteria bagi peruntukkan lahan tersebut

2.1.4 Kebijakan Lainnya Yang berkaitan dengan Penanganan Bopuncur

Dalam melihat aspek kebijakan yang mengatur Kawasan Bopuncur, selain melihat sejumlah kebijakan di atas, selayaknya juga memperhatikan sejumlah kebijakan lainnya yang secara langsung ataupun tidak memiliki keterkaitan dengan pengelolaan Bopuncur saat ini. Kebijakan-kebijakan tersebut terutama yang berhubungan dengan kebijakan sektoral yang pada dasarnya tidak secara khusus mengatur satu kawasan, namun

berlaku secara nasional. Kebijakan kebijakan jenis ini sesungguhnya sangat banyak ada yang berbentuk Undang-undang maupun peraturan di bawahnya. Sebagian kecil diantaranya yang dipandang perlu untuk dikemukakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
Dalam PP No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, ditegaskan bahwa Bopuncur ditetapkan sebagai salah satu kawasan tertentu yang memerlukan penanganan khusus. Kekhususan ini berhubungan dengan nilai strategis kawasan tersebut dalam memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya termasuk DKI Jakarta.
2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
Dalam peraturan ini, ditegaskan bahwa Sungai yang didalamnya mengatur juga tentang Waduk, diupayakan untuk tetap terjaga, khususnya dalam fungsinya sebagai penyangga sumber daya air, yang saat ini dirasakan semakin kritis. Dan melalui peraturan ini pemerintah berupaya mengatur secara lebih tegas persoalan yang berhubungan dengan sungai. Diantaranya adalah:
 - ❖ Penguasaan sungai yang ditegaskan bahwa sungai dikuasai oleh pemerintah/Negara, yang artinya seluruh pihak yang akan memanfaatkan sungai harus apat persetujuan dari Pemerintah.

- ❖ Dalam rangka penguasaan tersebut, maka peraturan ini telah menetapkan batas sempadan sungai, sebagai batas yang diperbolehkan atau tidak untuk dimanfaatkan.
 - ❖ Untuk menjamin keberhasilan penguasaannya, maka pola penguasaan sungai ditetapkan secara wilayah kesatuan sungai. Kebijakan ini menjadi penting bagi pengelolaan Kawasan Bopuncur, sebab di kawasan ini terletak banyak Daerah Aliran Sungai.
3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa Air sebagai suatu sumberdaya penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi, selayaknya mendapat pengaturan agar terjaga kualitasnya. Untuk itu melalui peraturan ini telah ditetapkan sejumlah regulasi tentang air baik yang di atas permukaan dan bawah tanah, mulai dari sumber daya air, pengelolaan, sampai dengan pengendalian pencemaran air dan penetapan baku mutu air. Pengelolaan Kawasan Bopuncur selayaknya mempertimbangkan peraturan ini, sebab sebagaimana ditetapkan oleh Kepres 114/1999 tentang Bopuncur adalah sebagai kawasan konservasi air.
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Dalam peraturan pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ini ditegaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Dengan sasaran untuk: (1) meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa; (2) mempertahankan keekaragaman tumbuhan satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam. Dan untuk itu dalam peraturan ini ditetapkan kawasan lindung adalah kawasan-kawasan yang meliputi:
- ❖ Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya; sementara yang dimaksud dengan kawasan ini adalah: kawasan hutan lindung; kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
 - ❖ Kawasan perlindungan setempat; sementara yang dimaksud dengan kawasan ini adalah: sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air.
 - ❖ Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya; sementara yang dimaksud dengan kawasan ini adalah: kawasan suaka alam, suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, hutan raya dan taman wisata alam.
 - ❖ Kawasan Rawan Bencana Alam Selanjutnya jika mengacu kepada peraturan ini, di Kawasan Bopuncur didapati banyak kawasan yang harus mengacu kepada ketentuan dalam pasal-pasal peraturan ini, sebab kawasan ini termasuk kawasan yang memberikan perlindungan kepada kawasan di bawahnya, ada kawasan perlindungan setempat seperti

sempadan sungai dan mata air, dan juga ada kawasan suaka alam dan cagar alam.

5. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dalam peraturan ini diatur tentang bagaimana pengelolaan hutan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk itu telah ditetapkan sejumlah aturan main dalam pengelolaan hutan ini. Dan dalam kepentingan pengelolaan kawasan Bopuncur yang di dalamnya meliputi sebagian adalah kawasan hutan, maka peraturan ini seharusnya menjadi rujukan pula.

2.2. Analisis Kebijakan, Rencana dan Program Kawasan Bopuncur

Dalam analisis KRP ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu analisis isi (*content*) dan analisis keterkaitan KRP dengan implementasinya.

Berdasarkan analisis isi (*content analysis*) dari kebijakan-rencana dan program :

1. Kebijakan yang ada dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok kebijakan.
 - Kebijakan yang secara langsung berhubungan dengan pengaturan tata ruang Kawasan Bopuncur (K-1)
 - Kebijakan yang mengatur tata ruang secara umum, dan tidak belaku khusus kepada Kawasan Bopuncur (K-2)
 - Kebijakan umum tentang pengaturan kewenangan pemerintahan (K-3)

Tabel 2
Matrik Kelompok Kebijakan Kawasan Bopuncur

	K-1	K-2	K-3
Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • PP No. 13/1963 • Kepres No. 48/1983 • Kepres No. 79/1985 • SK Bappenas tahun 1996 tentang Pokja Bopuncur • Kepres 114/1999 	PP No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional	UU No. 22/1999 PP No. 25/1999
Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan TAT Regional • SK GUB tentang kriteria lokasi dan standar teknis penataan ruang Bopuncur • SK Bappeda tentang pelarangan ijin lokasi • SK Gub penataan ulang Kawasan Bopuncur • Pasal-pasal tertentu dari Perda RTRW 	Perda No. 2/2003 tentang RTRW Jawa Barat	Perda Renstra Prop. Jawa Barat
Kab. Cianjur	<ul style="list-style-type: none"> • Perda No. 5/1994 RDTR Puncak • Pasal-pasal tertentu dari Perda RTRW 	Perda No. 1/1997 RTRW	Perda No. 8/2002 Renstra Daerah
Kab. Bogor	<ul style="list-style-type: none"> • Perda No. 3 /1988 RDTR Puncak • Pasal-pasal tertentu dari Perda RTRW 	Perda No. 17/2000 RTRW	<ul style="list-style-type: none"> • Perda Propeda • Renstra Dinas TR & LH
Kota Depok	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal-pasal tertentu dari Perda RTRW • RDTR Belum ada (karena sebelumnya di RDTR Puncak Kab. Bogor) 	Perda No. 12/2001 RTRW	

Berdasarkan analisis konten yang telah dilakukan atas keseluruhan KRP yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada umumnya isi dari KRP adalah berbentuk kebijakan, itupun dalam bentuk kebijakan yang sifatnya kriteria dan peruntukan.
2. Keterkaitan isi kebijakan pada level yang lebih strategis (nasional) dengan kebijakan di bawahnya tidak terlalu nampak aliran kebijakan, rencana atau programnya. Masing-masing kebijakan masih memuat kriteria-kriteria umum yang pada kebijakan yang lebih tinggi sudah ada.
3. Selain itu, isi kebijakan yang dikembangkan pada umumnya lebih bersifat spasial (keruangan), sementara pada tataran rencana dan atau program bahkan pada proyek atau kegiatan, bahkan dalam penganggaran yang secara empiris terjadi di lapangan lebih bersifat

sektoral. Perbedaan pendekatan ini telah menyebabkan pula terputusnya pola keterkaitan KRP dalam pengendalian Kawasan Bopuncur.

4. Antara kebijakan di tataran yang lebih strategis seringkali terjadi pengulangan atau kurang/tidak ada yang berbentuk aliran KRP, tapi semuanya lebih berbentuk kebijakan (khususnya) pada K-1. KRP yang ada belum berbentuk kebijakan yang dimungkinkan mengacu kepada Program atau rencana, tapi lebih bersifat kriteria dan peruntukan kawasan, itupun dilakukan dengan hanya dengan menyebut kecamatan dan desa (catatan, peta kawasan yang lebih detail misalnya 1:5000, seperti diminta Kepres No. 114/1999 semua daerah tidak memilikinya).

Tabel berikut ini memberikan gambaran isi kebijakan pada tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota.

Tabel 3
Hasil Analisis Isi Kebijakan dilihat dari keterkaitan KRP-nya

	Kebijakan	Rencana atau Program
Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kepres 114/1999 	
Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan TAT Regional • SK GUB tentang kriteria lokasi dan standar teknis penataan ruang Bopuncur • SK Bappeda tentang pelarangan ijin lokasi • SK Gub penataan ulang Kawasan Bopuncur • Pasal-pasal tertentu dari Perda RTRW 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 71 Perda RTRW tentang program penanggulangan kawasan dengan rencana tahun prioritasnya
Kab. Cianjur	<ul style="list-style-type: none"> • Perda No. 5/1994 RDTR Puncak • Pasal-pasal tertentu dari Perda RTRW 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 9 Perda RTRW Cianjur • Pasal 9 s.d 24 Perda Cianjur tentang RDTR uncak
Kab. Bogor	<ul style="list-style-type: none"> • Perda No. 3 /1988 RDTR Puncak • Pasal-pasal tertentu dari Perda RTRW 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6-31 Perda RTRW
Kota Depok	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal-pasal tertentu dalam RTRW 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 Perda RTRW Depok

Berikutnya, dalam analisis implementasi kebijakan dapat terlihat bahwa ada permasalahan dengan aspek koordinasi. Dalam unsur ini dapat dikatakan bahwa komunikasi perumusan KRP antar daerah dengan pusat, maupun daerah dengan daerah yang lain, bahkan antara suatu instansi di dalam satu daerahpun komunikasinya dapat dikategorikan tidak berjalan dengan baik. Salah satunya di tunjukkan oleh hasil analisis isi yang menunjukkan belum sesuai dengan yang direncanakan. Selain oleh kenyataan empirik tentang Kawasan Bopuncur yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Salah satu penyebab dari tidak berjalannya semua itu adalah adanya perbedaan orientasi dari para pembuat kebijakan di tataran makro (strategis) dengan para perencana di level bawah yang lebih cenderung menggunakan pendekatan sektoral. Dan yang kedua, adanya kepentingan para pengambil kebijakan yang lebih mengedepankan kepentingan non-publik.

Selain itu, kegagalan dari implementasi kebijakan tentang pengendalian Kawasan Bopuncur juga disebabkan oleh kurang berjalannya fungsi pemantauan dan pengendalian yang efektif. Sehingga fungsi hukum dalam bentuk *reward and punishment* dari seluruh kebijakan yang teridentifikasi tidak berjalan sama sekali. Sehingga dengan demikian KRP yang ada untuk mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan Bopuncur dapat dikatakan sudah cukup baik, namun dalam implementasinya sejumlah ketentuan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya koordinasi dan integrasi yang baik dalam upaya mengendalikan Kawasan Bopuncur, misalnya dengan telkom, listrik, jalan dan fasilitas sosial lainnya.

3. Penutup

Sejalan dengan hasil analisis atas kebijakan, rencana dan program (KRP) tersebut di atas, selanjutnya dapat direkomendasikan empat persoalan besar yang harus menjadi focus utama yang harus segera dipecahkan dalam penyelesaian masalah pengelolaan kawasan Bopuncur ini. Adapun keempat rekomendasi tersebut adalah:

Pertama, penyamaan cara pandang atas pemanfaatan kawasan Bopuncur dari seluruh *stakeholders* yang berkaitan dengan pengembangan kawasan Bopuncur. Tarik menarik antara kepentingan pengendalian dengan tekanan ekonomi harus dijawab secara tegas oleh KRP pengembangan kawasan Bopuncur di masa-masa mendatang. Pembiaran dalam ketidak jelasan akan menyebabkan pengembangan kawasan ini semakin tidak terkendali. Artinya, mesti satu kepastian bahwa kawasan ini tidak sepenuhnya untuk kawasan konservasi dan kawasan lindung, namun disebagian kawasan dimungkinkan untuk dijadikan kawasan budidaya. Namun persoalannya bagaimana KRP yang ada mampu memberikan jaminan atas pengembangan budidaya tersebut yang tidak mengganggu kawasan konservasi. Hal ini, seharusnya mampu dirumuskan secara tegas diantara seluruh stakeholder, mulai dari Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dan Kota Depok, serta Propinsi Jawa Barat dan Nasional, termasuk didalamnya dengan DKI Jakarta.

Kedua, untuk bisa memberikan jaminan bahwa keseluruhan KRP yang telah disepakati itu dapat dilaksanakan dengan melalui mekanisme yang sejalan dengan konsep otonomi daerah yang saat ini berlaku. Untuk itu dibutuhkan satu model kelembagaan yang secara khusus mengelola

kawasan ini. Kelembagaan ini dapat berbentuk kelembagaan permanen atau dalam bentuk forum yang bersifat koordinasi. Tapi yang harus menjadi bagian pentingnya adalah adanya kewenangan yang cukup kuat dari kelembagaan ini dalam aspek perencanaan dan pengendalian. Dalam perencanaan kelembagaan ini memiliki kekuatan untuk menekan perencanaan di tingkat daerah dan termasuk pusat untuk melakukan penyesuaian dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Begitu pula dalam pengendalian, kelembagaan ini seharusnya memiliki kekuatan yang kuat dalam menjamin seluruh stakeholders memenuhi ketentuan yang telah disepakati nya.

Ketiga, dengan mekanisme kelembagaan tersebut di atas, maka dimungkinkan ada suatu kawasan yang hanya berfungsi sebagai kawasan lindung atau konservasi, sementara di satu sisi ada satu kawasan yang justru menjadi kawasan budidaya. Untuk itu perlu diatur suatu mekanisme sharing pembiayaan dan keuntungan (*cost and benefit sharing*) akibat dari adanya konservasi tersebut. Mekanisme ini sangat diperlukan untuk membantu daerah hulu dalam menjaga dan mengendalikan kawasannya. Sementara daerah hilir ikut berkontribusi dalam pembiayaan di hulu, dikarenakan daerah tersebut ikut menikmati keuntungan dari adanya konservasi yang baik di kawasan hulunya.

Keempat, rekomendasi berikutnya yang harus menjadi perhatian kelembagaan yang mengelola kawasan Bopuncur ini, maupun stakeholders yang lainnya adalah memberlakukan mekanisme insentif dan disinsentif dalam pengelolaan kawasan Bopuncur sebagai suatu kawasan konservasi. Mekanisme ini sekaligus sebagai bentuk penghargaan bagi mereka yang secara

konsisten melakukan pengendalian dan punishment bagi yang tidak memenuhi kesepakatan yang telah di bentuk.

Daftar Referensi

- Dunn, William N, (2000), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R. (1977), *Understanding Public Policy*, Praeger, New York.
- Kaho, Joseph Riwu, (2002), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia-Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi
- Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung
- Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengendalian Kualitas air dan Pencemaran Air
- Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1991 tentang Sungai
- Peraturan Daerah Jawa Barat No. 2 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat
- Keputusan Presiden RI No. 114 tahun 1999 tentang Pengelolaan Kawasan Bopuncur
- Perda Kabupaten Cianjur Nomor 5 tahun 1994 tentang Review Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Puncak

Perda Kabupaten Cianjur Nomor 1 tahun 1997 tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur
Perda Kabupaten Cianjur No. 8 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur tahun 2001 – 2005

Perda Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 1988 tentang Review Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Puncak

Perda Kabupaten Bogor Nomor 17 tahun 2000 tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor

Perda Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Bogor tahun 2002 – 2006

Renstra Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor tahun 2002-2006

Perda Kota Depok Nomor 12 tahun 2001 tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok